



100

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	17.825.987.294.430,82
	b. Dana Perimbangan	Rp	9.149.708.963.289,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	1.321.665.225.150,00
	-- Jumlah Pendapatan		Rp 28.297.361.482.869,82
2.	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja Pegawai	Rp	8.757.472.025.898,00
	2) Belanja Bunga	Rp	4.353.524.981,00
	3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
	4) Belanja Hibah	Rp	825.595.987.217,00
	5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	38.587.205.558,00
	6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
	7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.338.583.170,00
	8) Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
			Rp 9.627.347.326.824,00
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja Pegawai	Rp	1.138.088.013.279,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	8.341.831.218.443,00
	3) Belanja Modal	Rp	7.316.333.334.751,00
			Rp 16.796.252.566.473,00
	Jumlah Belanja		Rp 26.423.599.893.297,00
	Surplus		Rp 1.873.761.589.572,82

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 4.926.078.266.154,38	
b. Pengeluaran	Rp 329.221.365.219,00	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp 4.596.856.900.935,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp 6.470.618.490.508,20

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 100

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 : 3
1	PENDAPATAN	26,845,693,060,531.00	28,297,361,482,869.82	1,451,668,422,338.82	105.41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,280,133,657,370.00	17,825,987,294,430.82	1,545,853,637,060.82	109.50
1.1.1	Pajak Daerah	13,965,000,000,000.00	15,221,249,152,689.46	1,256,249,152,689.46	109.00
1.1.2	Retribusi Daerah	456,248,032,680.00	609,349,051,004.00	153,101,018,324.00	133.56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	243,677,628,025.00	278,789,767,934.40	35,112,139,909.40	114.41
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	1,615,207,996,665.00	1,716,599,322,802.96	101,391,326,137.96	106.28
1.2	DANA PERIMBANGAN	8,658,411,159,801.00	9,149,708,963,289.00	491,297,803,488.00	105.67
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8,448,501,717,801.00	8,939,799,521,289.00	491,297,803,488.00	105.82
1.2.2	Dana Alokasi Umum	209,909,442,000.00	209,909,442,000.00	0.00	100.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,907,148,243,360.00	1,321,665,225,150.00	(585,483,018,210.00)	69.30
1.3.1	Pendapatan Hibah	594,000,000,000.00	8,410,777,790.00	(585,589,222,210.00)	1.42
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,313,148,243,360.00	1,313,254,447,360.00	106,204,000.00	100.01
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA DAERAH	30,922,361,719,302.38	26,423,599,893,297.00	(4,498,761,826,005.38)	85.45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,244,198,936,446.38	9,627,347,326,824.00	(616,851,609,622.38)	93.98
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	9,242,941,691,627.38	8,757,472,025,898.00	(485,469,665,729.38)	94.75
2.1.2	BELANJA BUNGA	4,353,828,000.00	4,353,524,981.00	(303,019.00)	99.99
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	BELANJA HIBAH	882,574,016,819.00	825,595,987,217.00	(56,978,029,602.00)	93.54
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5,269,400,000.00	38,587,205,558.00	(19,682,194,442.00)	66.22
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1,350,000,000.00	1,338,583,170.00	(11,416,830.00)	99.15
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	54,710,000,000.00	0.00	(54,710,000,000.00)	0.00

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6 = 4 : 3
2.2	BELANJA LANGSUNG	20,678,162,782,856.00	16,796,252,566,473.00	(3,881,910,216,383.00)	81.23
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,315,034,905,180.68	1,138,088,013,279.00	(176,946,891,901.68)	86.54
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,655,899,614,640.26	8,341,831,218,443.00	(1,314,068,396,197.26)	86.39
2.2.3	BELANJA MODAL	9,707,228,263,035.06	7,316,333,334,751.00	(2,390,894,928,284.06)	75.37
	Surplus / (Defisit)	(4,076,668,658,771.38)	1,873,761,589,572.82	5,950,430,248,344.20	0.00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	4,911,196,018,129.38	4,926,078,266,154.38	14,882,248,025.00	100.30
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,911,196,018,129.38	4,926,078,266,154.38	14,882,248,025.00	100.30
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4,911,196,018,129.38	4,911,196,018,129.38	0.00	100.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	14,882,248,025.00	14,882,248,025.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	834,527,359,358.00	329,221,365,219.00	(505,305,994,139.00)	39.45
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	54,556,325,705.00	54,556,325,705.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	694,000,000,000.00	136,780,777,790.00	(557,219,222,210.00)	19.71
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	140,527,359,358.00	133,559,739,102.00	(6,967,620,256.00)	95.04
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	4,324,522,622.00	4,324,522,622.00	0.00
	Pembiayaan Neto	4,076,668,658,771.38	4,596,856,900,935.38	520,188,242,164.00	112.76
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	6,470,618,490,508.20	6,470,618,490,508.20	0.00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

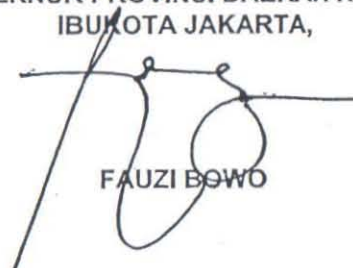
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20										OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN									
ORGANISASI : 1.20.002										SEKRETARIAT DPRD 0.01.01.00.0000.000									
KODE REKENING					URAIAN					Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	PENJELASAN						
1					2					3	4	5 = 4 - 3	6						
JUMLAH PENDAPATAN										0.00	0.00	0.00							
1.20	002	00	00	5							BELANJA DAERAH								
1.20	002	00	00	5	1						BELANJA TIDAK LANGSUNG	52,848,822,894.00	49,474,561,816.00	(3,374,261,078.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1					BELANJA PEGAWAI	52,848,822,894.00	49,474,561,816.00	(3,374,261,078.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	01				Gaji dan Tunjangan	33,141,624,821.00	31,463,940,521.00	(1,677,684,300.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	01	01			Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD	26,516,244,320.00	25,291,239,864.00	(1,225,004,456.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	01	03			Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	6,625,380,501.00	6,172,700,657.00	(452,679,844.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	02				Tambahan Penghasilan PNS	9,555,198,073.00	7,948,621,295.00	(1,606,576,778.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	02	05			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	9,555,198,073.00	7,948,621,295.00	(1,606,576,778.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	03				Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	10,152,000,000.00	10,062,000,000.00	(90,000,000.00)					
1.20	002	00	00	5	1	1	03	01			Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	10,152,000,000.00	10,062,000,000.00	(90,000,000.00)					
1.20	002			5	2						BELANJA LANGSUNG	188,599,667,030.00	120,292,035,270.00	(68,307,631,760.00)					
1.20	002	01									Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	116,924,582,050.00	68,345,897,540.00	(48,578,684,510.00)					
1.20	002	01	001								<i>Aktifitas Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta</i>	600,000,000.00	288,481,750.00	(311,518,250.00)					
1.20	002	01	001	5	2	1					BELANJA PEGAWAI	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00					
1.20	002	01	001	5	2	1	01				Honorarium PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00					
1.20	002	01	001	5	2	1	01	02			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00					
1.20	002	01	001	5	2	2					BELANJA BARANG DAN JASA	597,500,000.00	285,981,750.00	(311,518,250.00)					
1.20	002	01	001	5	2	2	01				Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	1,818,750.00	(681,250.00)					
1.20	002	01	001	5	2	2	01	02			Belanja Dokumen / Administrasi Tender	2,500,000.00	1,818,750.00	(681,250.00)					
1.20	002	01	001	5	2	2	03				Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)					

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 1.20.380 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 7.00.00.00.0000.000

KODE REKENING	URAIAN	Angg. Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	PENJELASAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		4,911,196,018,129.38	4,926,078,266,154.38	14,882,248,025.00	
1.20 380 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	834,527,359,358.00	211,459,668,565.00	(623,067,690,793.00)	
1.20 380 00 00 6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	(54,556,325,705.00)	(54,556,325,705.00)	
1.20 380 00 00 6 2 1 01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	(54,556,325,705.00)	(54,556,325,705.00)	
1.20 380 00 00 6 2 1 01 01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor	0.00	(54,556,325,705.00)	(54,556,325,705.00)	
1.20 380 00 00 6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	694,000,000,000.00	136,780,777,790.00	(557,219,222,210.00)	
1.20 380 00 00 6 2 2 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	694,000,000,000.00	136,780,777,790.00	(557,219,222,210.00)	
1.20 380 00 00 6 2 2 02 01	BUMD	694,000,000,000.00	136,780,777,790.00	(557,219,222,210.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	140,527,359,358.00	133,559,739,102.00	(6,967,620,256.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 01	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	11,228,300,000.00	11,227,980,606.00	(319,394.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 01 01	Penerusan Pinjaman	11,228,300,000.00	11,227,980,606.00	(319,394.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 11	Pembayaran Utang kepada Pihak ke III	126,998,134,220.00	120,985,101,023.00	(6,013,033,197.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 11 01	Pembayaran Utang Kepada Pihak ke III	126,998,134,220.00	120,985,101,023.00	(6,013,033,197.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 12	Pembayaran Utang Kepada Pegawai	2,300,925,138.00	1,346,657,473.00	(954,267,665.00)	
1.20 380 00 00 6 2 3 12 01	Pembayaran Utang Kepada Pegawai	2,300,925,138.00	1,346,657,473.00	(954,267,665.00)	
1.20 380 00 00 6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	(4,324,522,622.00)	(4,324,522,622.00)	
1.20 380 00 00 6 2 4 03	Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir	0.00	(4,324,522,622.00)	(4,324,522,622.00)	
1.20 380 00 00 6 2 4 03 01	Dana Bergulir PPMK Kepada Perorangan dan Kelompok Masyarakat	0.00	(4,324,522,622.00)	(4,324,522,622.00)	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		834,527,359,358.00	211,459,668,565.00	(623,067,690,793.00)	
PEMBIAYAAN NETTO		4,076,668,658,771.38	4,714,618,597,589.38	637,949,938,818.00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO